

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sektor perekonomian teknologi yang semakin maju mempengaruhi perkembangan pada setiap perusahaan, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Masalah yang dihadapi perusahaan juga semakin rumit terutama dalam penyajian laporan keuangan. Di dalam mencapai tujuan perusahaan selalu menghadapi masalah baik itu dari dalam maupun dari luar perusahaan, untuk itu diperlukan adanya pengendalian internal yang dapat membantu memperlancar kegiatan dalam perusahaan dan memperkecil resiko terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam setiap aktivitas perusahaan.

Sebuah instansi pemerintah mempunyai suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan operasinya membutuhkan pengelolaan aset yang baik. Terkait dengan pengelolaan aset di setiap instansi baik milik pemerintah maupun perorangan/swasta maka instansi tersebut harus memiliki prosedur pengelolaan aset, agar aset di kantor bisa dimanfaatkan dengan seekfektif mungkin. Aset adalah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan dikuasai oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi masa lalu, salah satunya adalah aset tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan produk. Untuk menghasilkan produk ini, maka peranan aset tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi dan lain-lain.

Pengadaan suatu aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya. PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sementara menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.16, “Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.” Dari pernyataan ini dapat diringkas bahwa aset tetap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai bentuk fisik
2. Dipakai dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional perusahaan
3. Dimiliki tidak untuk diperdagangkan
4. Mempunyai jangka waktu kegunaan (umur) relatif lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari satu tahun
5. Memberi manfaat dimasa yang akan datang

Di dalam menjalankan kegiatan operasional instansi pemerintah, proses perolehan aset tetap tersebut harus hati-hati, karena kesalahan dalam mengelola cara memperoleh aset tetap juga akan mempengaruhi operasi instansi pemerintahan, terutama dari segi dana yang tersedia untuk memperoleh aset tetap tersebut. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat bagi para pengambil keputusan, tentang kebijakan apa yang perlu diambil untuk memperoleh aset tetap. Cara perolehan aset tetap bermacam-macam, ada yang diperoleh dengan cara membeli tunai, pembelian angsuran, dibangun sendiri dan dapat juga diperoleh dari sumbangan atau donasi (hadiah) dan lain-lain. (Baridwan , 2004)

Penentuan harga perolehan aset tetap tidak dilihat dari sudut harga belinya, tetapi mencakup seluruh pengeluaran sampai aset tersebut siap untuk dioperasikan perusahaan. Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 biaya perolehan adalah jumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dipergunakan. Seiring berjalannya waktu, maka aset tetap telah dimiliki instansi pemerintah tentunya mempunyai batas waktu untuk beroperasi. Aset tetap kecuali tanah yang dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lama kelamaan akan mengalami kerusakan atau susut. Oleh karena itu terhadap aset tetap dilakukan penyusutan. Aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap mempunyai nilai nominal yang sangat besar, untuk itu instansi pemerintah harus memanfaatkan penggunaan aset tetap dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah tersebut. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas pokok mewujudkan peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara rasional, efisien, dan berkelanjutan guna mendorong pembangunan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan pokok dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat tersebut, diperlukan aset tetap yang berupa tanah, bangunan, kendaraan operasional, dan lain-lain. Dengan adanya aset tetap, maka diperlukan pula pengelolaan yang baik terhadap aset tetap di dinas tersebut agar dapat terus dipergunakan dan diperbaharui.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka penulis memilih judul **“PROSEDUR PENGELOLAAN ASET TETAP PADA KANTOR DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan aset tetap pada Kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja masalah dalam pengelolaan aset tetap pada Kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pengelolaan aset tetap pada Kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan aset tetap pada Kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

- a. Bagi akademisi

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan aset tetap pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, menambah ilmu dan wawasan, berfikir serta memantapkan ilmu yang telah diperoleh.

b. Bagi praktisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam prosedur pengelolaan aset pada instansi pemerintah di masa yang akan datang.

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Untuk memenuhi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis melaksanakan magang yang sesuai dengan judul Tugas Akhir yang diajukan oleh penulis, yaitu prosedur pengelolaan aset tetap pada kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan magang ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d 4 Maret 2016.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu magang, sistematika laporan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan pembahasan tugas akhir ini.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROV. SUMBAR**

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat, Wilayah Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang Prosedur Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang dilakukan oleh penulis.

